



► PENDIDIKAN KESETARAAN

## Separuh PKBM di Kota Jogja Belum Terakreditasi

JOGJA—Lebih dari separuh jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kota Jogja belum terakreditasi sehingga harus menumpang di PKBM saat ujian nasional (UN). Dinas Pendidikan Kota Jogja mendorong PKBM tersebut mengajukan akreditasi dengan sistem *online* yang tidak membutuhkan dana besar.

Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Jogja Eka Yuniarta menyatakan terus mengupayakan agar PKBM bisa mendapatkan akreditasi di semua jenjang, baik Paket A, B maupun C. Meski demikian, ia tidak menampik proses pemenuhan persyaratan akreditasi kadang dirasa berat oleh pengelola PKBM, terutama yang berdiri secara mandiri di tengah masyarakat.

"Karena borangnya tebal, selain harus mengumpulkan persyaratan

itu, mereka juga harus menggandakan borang cukup banyak sehingga harus ada dana mandiri untuk itu," kata dia, Rabu (21/3).

Saat ini jumlah PKBM yang sudah diakreditasi baru tujuh. Sisanya, sekitar 10 PKBM, belum terakreditasi sehingga dalam pelaksanaan UNBK 2018 secara administrasi harus menumpang di PKBM lain yang sudah terakreditasi.

"Pendidikan kesetaraan dan PAUD itu kan sudah menjadi standar pelayanan minimal, ada peraturan pemerintahnya. Mau tidak mau harus memperhatikan pendidikan kesetaraan, sehingga akreditasi itu penting," kata dia.

Sejak 2018 ini, kata dia, proses akreditasi bisa dilakukan secara *online* sehingga dapat menekan biaya yang seharusnya dibutuhkan untuk penggandaan borang atau formulir. Penilaian itu dilakukan secara *online* melalui aplikasi *Sistem*

*Penilaian Akreditasi* atau dikenal dengan *Sipena*. Tahun ini DIY mendapatkan kuota 750 lembaga yang mengajukan akreditasi, termasuk PKBM.

"Tahun ini yang siap maju akreditasi ada enam PKBM," ujar dia.

Dinas Pendidikan Kota Jogja akan memberikan pendampingan bagi PKBM yang secara serius mengajukan akreditasi. "Dalam waktu dekat ini, kami akan mengundang PKBM untuk sosialisasi cara mengisi *Sipena*, untuk mengisi borang secara *online*," kata dia.

Ketua DPD PKBM Kota Jogja Eko Ratmoko mengatakan banyaknya persyaratan menghambat PKBM yang berniat mengajukan akreditasi.

Menurutnya, dari 10 PKBM yang belum terakreditasi, ada tiga yang hingga saat ini masih kesulitan mengurus izin karena terkendala izin mendirikan bangunan (IMB) dan sejenisnya. (Sunartono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005